

Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Government

Vol 9 Issue 1
(Jnuari - Juli, 2025)

Hikmah Muhaimin^{1*}, Ahmad Hasan Afandi², Santosa³,
Revalina Dwi Istya Ningrum⁴, Shella Rizki Junizar⁵

¹²³⁴⁵ Governmental Science Study Program, Social and Political
Science, Islam Majapahit University

Email: hikmahip@unim.ac.id^{1*}, hasan.afandi@unim.ac.id²,
santosa@unim.ac.id³, revalinarevalina84@gmail.com⁴,
shellarizkij@gmail.com⁵

ARTICLE INFO

Article history:

Received: xxx
Revised version received: xxx
Accepted: xxx
Available online: xxx

Keywords:

Bureaucratic Reform;
Good Government;

How to Cite:



ABSTRACT

Bureaucratic reform is a strategic step towards creating good governance by enhancing efficiency, transparency, and accountability in public service. Bureaucratic reform not only increases government legitimacy but also creates a comprehensive and sustainable environment for a better and more equitable government.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>
Copyright (c) 2024 by IJGCS

1. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara berkembang yang dinamis, yang memiliki upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Konsep *good governance* menjadi acuan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada layanan publik. Salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai *good governance* adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi telah menjadi agenda penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) di Indonesia.

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun negara lebih berdaya dan berhasil dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Upaya ini menjadi semakin mendesak karena mengingat praktik birokrasi di Indonesia yang masih diwarnai berbagai permasalahan seperti prosedur yang berbelit-belit, pelayanan publik yang lambat, praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), serta rendahnya profesionalisme aparatur negara. Birokrasi yang sehat dan responsif merupakan pilar penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan melayani masyarakat dengan optimal.

Melalui reformasi ini, diharapkan birokrasi bisa meningkatkan kinerja pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. dengan demikian, reformasi birokrasi dapat mewujudkan *good government* yang responsif dan bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat.

Pendahuluan ini akan membahas pentingnya reformasi birokrasi sebagai langkah strategis dalam mewujudkan *good governance* di Indonesia, ini akan mencakup tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi, strategi yang telah dan perlu diterapkan. Selanjutnya, uraian akan menelusuri bagaimana reformasi birokrasi berkontribusi pada peningkatan pelayanan publik, penguatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran krusial reformasi birokrasi dalam mencapai cita-cita *good governance* di Indonesia.

2. Metode

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan teknik kepustakaan untuk mengumpulkan data. Membaca dan memahami teori dari berbagai literature yang relevan dengan penelitian. teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya di

situs *web* atau aplikasi jurnal lainnya. Materi tersebut dianalisis beberapa kali sebelum menghasilkan suatu karya ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

Perwujudan Reformasi Birokrasi dan *Good Government*

Reformasi birokrasi sangat penting bagi pembangunan suatu negara dan dapat menghasilkan sistem tata kelola tidak hanya efektif dan efisien tetapi juga transparan dan akuntabel. Reformasi birokrasi merupakan suatu lembaga yang meliputi sistem dan struktur birokrasi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik. Reformasi birokrasi memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan sehat, dalam mewujudkan *good government*, reformasi birokrasi harus mempertimbangkan beberapa kebijakan yang struktural, kapasitas, dan instrumental.

Langkah *pertama* yang dapat diambil adalah meningkatkan efisiensi organisasi internal maupun eksternal, hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menghadapi tantangan zaman yang dapat mempengaruhi kinerja serta kepercayaan masyarakat. Meningkatkan intensitas dalam memotivasi kinerja birokrasi guna menciptakan budaya kerja yang efektif. *Kedua*, menciptakan sistem internal yang mampu mendorong kesadaran birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Kesadaran untuk menghasilkan inovasi dan kreatifitas guna memotivasi birokrat lainnya dalam merespon perkembangan masyarakat. *Ketiga*, penataan sistem eksternal yang efektif untuk mengurangi politisasi birokrasi dan mengatasi perilaku buruk birokrat dalam pelayanan masyarakat. Birokrasi sangat rentang dalam intervensi elit lokal untuk memenuhi keinginan dari kelompok tertentu dalam mendapatkan kekuasaan, untuk mencegah itu semua birokrasi harus bersifat netral. Oleh karena itu, diperlukan sistem eksternal yang dapat melindungi birokrasi dari kepentingan politik. *Keempat*, adanya reformasi jangka pendek yang bertujuan untuk mencegah tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Penerapan reformasi birokrasi dengan tujuan meningkatkan efisien, transparansi, dan akuntabilitas, dapat memberikan dampak yang signifikan, seperti menghilangkan praktik korupsi dan meningkatkan pelayanan publik, penerapan ini merupakan langkah yang tepat guna menciptakan *good government* di dalam tata kelola pemerintah. Dengan cara ini, pemerintah dapat membangun pondasi yang kuat untuk menciptakan tata kelola yang baik dan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Kepercayaan publik merupakan aspek yang kuat dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Reformasi birokrasi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan *good government*, kedua konsep ini saling berjalan dan saling berkaitan satu sama lain. Keberhasilan dari reformasi birokrasi mampu menuntun suatu negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan adil.

Permasalahan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan *Good Government*

Dalam proses pelaksanaan reformasi birokrasi permasalahan yang sering muncul dan menghambat, baik dari sisi organisasi, prosedur, maupun sumber daya manusianya. Permasalahan tersebut mencakup internal maupun eksternal. Sedangkan sudah banyak tuntutan-tuntutan publik yang semakin besar, seperti banyak masyarakat yang sudah mengikuti kemajuan teknologi dan pendidikan, sehingga masyarakat lebih kritis akan penyelenggaraan pemerintah, sehingga masyarakat menuntut untuk pelaksanaan birokrasi yang efektif dan efisien. Tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi masih belum bisa dikatakan baik dan bersih, seperti halnya tingkat perilaku pelayanan publik dan korupsi belum dinyatakan baik.

Upaya pemerintah yang bisa dikatakan jauh lebih baik adalah keterbukaan informasi. Penerapan ini merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas dan transparansi, hal ini dapat menimbulkan rasa kepercayaan masyarakat pada pemerintah meningkat, sebaliknya juga pemerintah tidak transparan dan akuntabel maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam mencapai *good government*.

Langkah tegas yang dapat diambil dalam menyikapi permasalahan reformasi birokrasi yang dapat menghambat *good government*, diantaranya:

- a) Penegakan hukum yang adil dan beradab, merupakan prinsip penting dalam mencapai *good government*, langkah ini dapat digunakan untuk meyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
- b) Pemerataan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik, langkah ini dapat meningkatkan kualitas masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan masyarakat yang nyaman, efektif, dan efisien dalam menggunakan layanan pemerintah.
- c) Keterbukaan informasi pemerintahan, adalah langkah yang penting dalam sistem demokrasi dan menciptakan tata kelola yang baik, keterbukaan informasi dapat menjaga akuntabilitas pemerintahan terhadap masyarakat. Keterbukaan informasi dapat masyarakat gunakan untuk memberikan masukan, saran, bahkan kritik terhadap kebijakan yang pemerintah keluarkan,
- d) Sumber daya manusia (SDM), langkah ini sangat penting guna menciptaakan pelayanan publik, yang baik. Mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, serta berkontribusi pada pembangunan negara secara keseluruhan.

4. Kesimpulan

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis yang tak terpisahkan dari upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia. Pentingnya reformasi birokrasi dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik serta membangun lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik. Adapun tantangan yang dihadapi dalam proses reformasi, seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya sumber daya, dan budaya birokrasi yang kaku. Namun dengan demikian, mengusulkan solusi seperti penegakan hukum yang adil, mempromosikan pembangunan yang adil, dan mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Beberapa langkah penting yang telah diidentifikasi meliputi peningkatan efisiensi organisasi, penciptaan sistem internal yang berorientasi pada pelayanan publik, penerapan sistem eksternal untuk mengurangi politisasi birokrasi, dan reformasi jangka pendek untuk mencegah korupsi. Keterbukaan informasi dan penegakan hukum yang adil menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, pemerataan pembangunan, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek krusial dalam mewujudkan *good government*. Reformasi birokrasi di Indonesia membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun birokrat. Proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, dan kolaborasi yang erat untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, reformasi birokrasi yang berkelanjutan dan komprehensif akan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Damanhuri, D., & Jawandi, R. (2017). Reaktualisasi reformasi birokrasi menuju good governance. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP UNTIRTA 2017*, 2(6).
- Miza Nina Adlini, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, & Sauda Julia Merliyana. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Pohan, S., Pamungkas, Y., Tobing, L., & Mazuda, A. (2024). Tantangan Implementasi Good Governance Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Indonesia. *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan*, 2(1).
- Setyasih, E. T. (2023). Reformasi Birokrasi Dan Tantangan Implementasi Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1).

- Sumantri, I. (2022). Reorientasi Reformasi Birokrasi Dan Good Governance Dalam Penyelenggaraan Sektor Publik Di Indonesia. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan Dan Politik*, 5(2). <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679>
- Suwidyanti, N. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja Di Kota Surabaya. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.37606/publik.v10i2.560>
- Yasa, A., Suswanta, S., Rafi, M., Rahmanto, F., Setiawan, D., & Iqbal Fadhlurrohman, M. (2021). Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.139>